



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS GADJAH MADA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EDUARDUS TANDELILIN
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI MANAJEMEN (KAMPUS JAKARTA)
3. NHK : 962764

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 8.223.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 409 m<sup>2</sup>/300 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
2. Tanah Seluas 194 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 498.000.000
3. Bangunan Seluas 48 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m<sup>2</sup>/180 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m<sup>2</sup>/34 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.525.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 836.000.000

1. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 500.000.000



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.325.202.771
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	23.884.202.771
III. HUTANG	Rp.	18.212.021
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>23.865.990.750</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpni.kpk.go.id](http://elhkpni.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpni.kpk.go.id](http://elhkpni.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.